

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang permasalahan penduduknya sangat universal dan seringkali dalam praktek penyelesaiannya sangat rumit dan seringkali sulit untuk diurai permasalahannya. Dari salah satu permasalahan di Indonesia yang seringkali menjadi rumit ialah berkenaan mengenai permasalahan kependudukan, yang salah satunya diakibatkan karena adanya migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, sehingga kondisi perkotaan ketika terjadinya imigrasi ini menyebabkan perkotaan semakin sempit dan pertumbuhan penduduknya semakin menggemuk sehingga banyak menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan dan lain sebagainya yang seringkali ditemui di daerah perkotaan. Terjadinya migrasi dari desa ke kota tersebut ditandai oleh beberapa faktor penyebab yakni, kurangnya peran pemerintah dalam mendukung peningkatan taraf hidup di desa, terjadinya ancaman-ancaman yang menyebabkan perekonomian di desa terganggu, tingkat lapangan kerja yang minim di desa, kurangnya pemberdayaan usaha kecil menengah di desa, kurang memiliki keahlian lebih dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing. Kemiskinan menjadi penyebab dan faktor menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan lain sebagainya. Selain itu, kemiskinan juga dapat memaksa seseorang untuk menjadikannya pengemis dan gelandangan karena kurangnya hunian yang layak untuk membantu kehidupan mereka di kota

agar dapat bersaing dan menjadikan profesi tersebut sebagai pekerjaan utama dikota. Rendahnya tingkat pendidikan pengemis dan gelandangan ini semakin menyebabkan hambatan bagi mereka untuk mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak agar terpenuhinya kehidupan pribadi sehari-hari ataupun menjadikan kebutuhan hidupnya berkeluarga.

Untuk membangun sebuah peradaban dalam suatu negara setidaknya dibutuhkan empat pilar penopang yang akan membangun peradaban di sebuah negara tersebut, empat pilar itu mencakup politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah memerintahkan dalam Q.S. An-Nisa 4; 9 yang artinya *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan..."* artinya, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan masa depannya, karena pendidikan mempunyai amanah penting untuk menyiapkan generasi-generasi yang unggul dan tangguh sebagai persiapan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa mendatang, terkhusus hari ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi dengan angka pemuda yang lebih banyak namun belum mampu dimanfaatkan oleh Indonesia sendiri sebagai sumber daya manusia yang unggul untuk membangun peradaban bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan kearah yang lebih universal sejak Indonesia merdeka. Dan hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi sehingga timbulnya tantangan-tantangan baru yang sebelumnya tidak diprediksi, dan pada akhirnya, imbasnya akan sampai pada pendidikan karena

adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dari pendidikan dengan hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut. Untuk mengatasi dan mengurangi masalah tersebut, kondisi pendidikan yang progresif dan efisien sangat dibutuhkan terkhusus dengan kondisi Indonesia saat ini. Dan sepatutnya pendidikan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah terkhusus perhatian lembaga khusus negara yang menyelesaikan masalah ini, semua elemen dalam bangsa, negara dan masyarakat harus terlibat aktif dalam penyelesaian masalah pendidikan tersebut. Dalam amanat undang undang terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya dengan adanya pendidikan yang unggul mampu mencerdaskan peserta didik serta membentuk manusia-manusia yang unggul, berkarakter, beradab dan tertaqwa pada tuhan yang maha esa. Pilar pendidikan untuk membangun peradaban ini harus menjadi fokus utama dan diutamakan karena kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan kualitas pendidikan di negara tersebut. Pembangunan pendidikan haruslah berkemajuan sehingga siswa, guru, proses belajar mengajar, tata kelola administrasi serta layanan pendidikan penunjang lainnya mampu bersinergi dan terlaksana dengan sebaik-baiknya (Syah M. 2004: 39)

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan-keterampilan lainnya yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor 20 tahun 2003). Pendidikan formal di Indonesia dilaksanakan sejak anak usia dini hingga

pada perguruan tinggi yang nantinya akan menyiapkan lulusan-lulusan yang unggul sesuai bidan dan kepakarannya. Secara hakiki pendidikan dilaksanakan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Undang-undang nomor 20 menjelaskan mengenai sisdiknas pendidikan anak usia dini yang kebanyakan anak-anak sudah didasari dengan pendidikan yang mengarah pada pengajaran nilai-nilai dan norma yang baik agar kelak dapat terbentuknya kepribadian dan potensi diri yang baik sesuai dengan perkembangan anak (Herlina, 2003: 12). Didalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya dan termasuk juga anak jalanan (Herlina, 2003: 19) jangan pernah membedakan hak-hak anak jalanan dengan hak-hak anak pada umumnya, karena setiap anak di Indonesia ini berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya.

Pada realitasnya masih banyak kita temukan anak-anak terlantar yang kesehariannya mereka habiskan hidup dijalan. Kehadiran anak jalanan merupakan akibat adanya kondisi yang kurang baik dalam tatanan keluarga yang disebabkan karena keluarga yang kurang harmonis, akibat perekonomian keluarga, adanya kekerasan terhadap anak dan disorganisasi keluarga lainnya, termasuk pada kurang perhatiannya orang tua terhadap anak yang menyebabkan anak lepas kedali dengan orang tuanya sendiri sehingga memungkinkan anak untuk mencari kehidupan yang lebih bebas tanpa adanya aturan dan memaksa mereka hidup dan bertahan dijalan. Ramainya anak jalanan ini merupakan bukti adanya ketidak

mampuan keluarga untuk memenuhi aspek-aspek dalam keluarga seperti rasa aman, rasa nyaman, rasa cinta kasih dan lain sebagainya. Dalam undang-undang perlindungan anak Republik Indonesia, disebutkan didalam pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” pada dasarnya pasal ini menjadi hak dasar dan konstitusional warga kurang mampu dan anak-anak terlantar, artinya dipelihara oleh negara disini bukan berarti negara memelihara dan membudayakan orang miskin dan anak jalanan, namun negara harus mampu menjamin keadilan dan kehidupan yang sejahtera bagi mereka agar terciptanya nilai-nilai yang mampu membuat mereka hidup lebih layak. Undang-undang dasar sudah sepantasnya menjadi payung hukum bagi masyarakatnya sendiri dan wajib pasalnya bagi negara untuk tidak mengabaikan keberadaan orang miskin, anak jalanan dan lain sebagainya, negara sepenuhnya harus bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Perhatian pemerintah terhadap anak jalanan harus memberikan pendidikan yang layak untuk menopang pengembangan diri dan kecerdasan spiritual maupun emosional anak. Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (undang-undang perlindungan anak). Keberadaan anak jalanan sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang melihat keberadaannya, anak jalanan seringkali dipandang sebagai sampah masyarakat, namun yang harus masyarakat ketahui ialah setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama rata untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti anak pada umumnya tanpa membedakan suku

ras dan agama ataupun profesi dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah sepatutnya pendidikan harus secara menyeluruh dapat diberikan dan dirasakan pada masyarakat tanpa memandang status sosial dan lain sebagainya, termasuk pendidikan pada anak jalanan harus lebih serius pemerintah dalam proses pembinaan dan pendidikannya agar anak jalanan dinegeri ini semakin berkurang.

Permasalahan anak yang seringkali kita temui diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, perlakuan salah terhadap anak, permasalahan yang pertama ini seringkali terjadi adanya penyiksaan terhadap anak baik secara psikis ataupun fisik dan seksual, yang kedua ialah penelantaran terhadap anak, yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian sepenuhnya terhadap proses tumbuh kembang anak. Ketiga, eksploitasi terhadap anak, eksploitasi anak lebih merujuk pada sikap yang sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, seperti penjualan anak untuk melakukan suatu hal demi kepentingan dan keberlangsungan perekonomian keluarga seperti meminta anak untuk mengamen, meminta anak untuk melakukan hubungan dengan orang yang telah disepakati oleh anggota keluarga dan lain sebagainya (Suharto Edi, 2005: 160)

Banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama masalah social yang menyangkut kesejahteraan anak jalanan yang harus mendapatkan perhatian lebih bagi bangsa negara dan masyarakat secara umumnya. Jika kita coba telaah lebih dalam, setidaknya ada empat tipologi perlakuan masyarakat melihat anak-anak jalanan, yang pertama adalah antipati, antipati ini berarti masyarakat melihat anak jalanan ibarat sesuatu yang mengganggu atau sampah dan sumber

masalah. Masyarakat yang acuh takacuh terhadap nasib anak jalanan, tingkat toleransi yang rendah sehingga mereka sedikit hartanya untuk diberikan kepada anak-anak jalanan. Masyarakat yang masuk pada kategori terakhir ini merupakan orang yang senantiasa memberi pada anak jalanan sehingga sedikit banyak pemberiannya mampu membantu mereka. (Ambar Adriyanto, 2005: 163)

Permasalahan anak jalanan di Indonesia memang bukan menjadi satu permasalahan baru yang naik turun, namun selalu ada dan naik dipermukaan. Sasarannya permasalahan ini seringkali terjadi di daerah perkotaan-perkotaan besar seperti, Bandung, Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Permasalahan ini dikategorikan sebagai permasalahan sosial Indonesia. Permasalahan ini seringkali timbul karena adanya perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus dan tidak mampu diperkirakan, sehingga anak jalanan ini tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang ada ketika seringkali terjadi perubahan social. Jika dilihat dari aspek kesejahteraan social, keadaan sehari-hari anak jalanan ini terlihat sangat memprihatinkan. Pola kehidupannya cenderung tidak sesuai dengan norma kehidupan di dalam masyarakat karna mereka terlahir sudah menjadi orang yang bebas dalam masyarakat. Ini terjadi karena beberapa penyebab yang bermacam-macam yang salah satu diantaranya adalah Karena terjadinya kemiskinan. Pemerintah dalam prakteknya sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menangani permasalahan anak jalanan ini. Namun seiring dengan kemajuan zaman dengan kondisi perekonomian yang terus menerus naik, kasus kemiskinan dan anak jalanan akan semakin besar.

Permasalahan yang terjadi pada kalangan anak jalanan ini sangatlah beragam kondisinya mulai dari disebabkan adanya keterbatasan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, kondisi kesehatan yang kurang baik, tingkat partisipasi pendidikan yang rendah serta disebabkan karena faktor kondisi sosial, spiritual yang sangat lemah. Selain itu dari tahun ketahun, jumlah anak jalanan yang ada tidak menjadikannya menurun, namun dari tahun ketahun terjadi peningkatan anak jalanan, seperti halnya yang seringkali peneliti lihat di daerah kota Bandung bahkan sekitar kampus peneliti sendiri.

Dengan adanya permasalahan yang kompleks tersebut, harus ada penanganan dan perhatian lebih untuk secara keberlanjutan memperhatikan kondisi anak jalanan ini. Sesuai dengan Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002).

Yang menjadi perhatian disana adalah anak terlantar yang berarti termasuk anak jalanan. Permasalahan yang seringkali terjadi pada anak jalanan haruslah sejak saat ini diminimalisir. Jika melihat kondisi keluarga tau orang tua dari anak jalanan ini memang benar-benar tidak mampu untuk menopang perekonomian keluarganya maka negara wajib bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kondisi kesejahteraan anak dan keluarganya. Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan-perlindungan khusus kepada anak-

anak jalanan untuk dalam kondisi darurat seperti, anak jalanan yang sedang menghadapi kasus hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak jalanan yang mencakup eksploitasi untuk kebutuhan ekonomi dan seksual, perdagangan anak, anak yang menjadi korban dari zat-zat terlarang seperti, narkoba, shabu dan lain sebagainya, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun psikis yang menyebabkan anak menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran (Undang-undang perlindungan anak 23 tahun 2002)

Peran pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menanggulangi anak jalanan ini, sokongan kepada pemerintah dalam menuntaskan permasalahan sosial anak jalanan ini harus didukung dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah anak jalanan ini terkhusus terkait dengan kondisi kesejahteraannya, masyarakat harus sudah bias menyadari bahwa anak-anak inilah yang kelak menjadi tumpuan Indonesia. dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2005 “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penanganan anak jalanan dilaksanakan melalui kegiatan peran lembaga swadaya masyarakat”. Bentuk peran tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanganan kepada anak Jalanan “Pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan penanganan anak melalui pusat pengembangan layanan anak jalanan, panti sosial anak, rumah singgah, rumah perlindungan anak, rumah belajar, pusat kegiatan masyarakat, melalui organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4)

Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa negara dan masyarakat mempunyai kewajiban moral secara fisik maupun nonfisik untuk memenuhi hak setiap anak tanpa terkecualikan, serta terbebas dari berbagai macam ancaman yang mengancam jiwa dan kehidupan mereka, seperti halnya seorang anak yang telah kehilangan hak anaknya didalam keluarga. Kondisi yang terjadi tersebut sangatlah rentan pada perlakuan yang tidak sepatasnya mereka dapatkan ketika hidup dijalan yang memang pada dasarnya kehidupan jalanan sangatlah keras dan bebas. Selain karena ancaman dari luar, anak-anak jalanan ini dapat dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpa adanya kontroling dari orang tua sehingga kemungkinan besar dapat membahayakan kondisi keseslamatan orang lain ataupun kondisi keselamatan dirinya sendiri, seperti seks bebas, pencopetan, meminum minuman keras, narkoba/shabu dan perkelahian.

Keberadaan anak jalanan ini dengan keuniversalan permasalahan yang dihadapinya, menuntut berbagai pihak ikut andil dan terlibat proaktif dengan pemerintah untuk bekerjasama memperhatikan kondisi anak jalanan ini dan memberikan masukan masukan yang kongkrit pada pemerinta mengenai penanganan anak jalanan. Salah satu cara pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat adalah dengan adanya kerjasama untuk melakukan penyelesaian anak jalanan dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial non pemerintah yang peduli terhadap kondisi sosial anak jalanan.

Pelibatan lembaga sosial masyarakat dalam penuntasan permasalahan anak jalanan merupakan salah satu cara yang bias dibilang evisien, karena lembaga sosial masyarakat mampu menganalisa kondisi dan kebutuhan sosial yang

dibutuhkan anak jalanan. Terkhusus lembaga sosial masyarakat sudah paham mengenai pembinaan apa yang harus diterapkan pada anak-anak jalanan tersebut. Pembinaan merupakan salah satu upaya yang disengaja dan terukur oleh lembaga sosial masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi. Tujuan dari diadakannya pembinaan pada sektor pendidikan didalam masyarakat yang memilii masalah sosial adalah untuk mewedahi anak-anak jalanan yang pendidikannya terputus disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor didalam ranah keluarga lainnya yang sudah tidak memperoleh pendidikan yang layak seperti anak-anak Indonesia pada umumnya. Praktek pembinaan ini dikhususkan untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia yang berpendidikan agar pada masa mendatang mereka mempunyai pegangan hidup dan mempunyai skil untuk mampu bersaing dengan anak-anak pada umumnya.

Masdar helmi menyebutkan bahwa pembinaan adalah usaha sadar dengan kegiatan yang behubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Pembinaan ini merupakan kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk mengurangi munculnya anak jalanan, gelandangan pengamen pengemis dan lain sebagainya melalui cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak jalanan. Artinya pembinaan disini adalah sebagai upaya sadar untuk mengurangi sehingga jumlahnya berkurang dan untuk ketertiban umum. Motivasi adalah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pendidik, karena tanpa motivasi mustahil seorang siswa dapat berhasil di sekolah

Pendidikan bagi anak jalanan telah banyak dilakukan, namun motivasi belajar anak jalanan itu sendiri masih sangatlah rendah. Suhadianto (2009), program peningkatan motivasi belajar dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu: Metode ceramah, dengan cara memberikan cerita-cerita tentang motivasi, Metode *game*, dengan cara memberikan *games* yang dapat meningkatkan motivasi belajar.” Sebagai media pembelajaran, permainan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: “permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur dan menarik.”

Sekolah Cermat Pengurus Wilayah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Jawa Barat ini berdiri pada 28 Oktober 2013, karena kepedulian KAMMI terhadap permasalahan sosial, khususnya permasalahan anak jalanan. LSO ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan, sasaran utama yang menjadi binaan dari Sekolah ini adalah anak jalanan dan para anak-anak dari keluarga dhuafa yang berpotensi menjadi anak jalanan.

Pembinaan dilaksanakan di kawasan tempat tinggal anak-anak yaitu di daerah Citepus I, II dan III Kelurahan Padjajaran Kecamatan Cicendo Bandung. Anak binaan Sekolah Cermat terbagi kepada dua kategori, Laskar Hamka dan Natsir. Hamka merupakan kelompok anak binaan yang suka turun ke jalanan, sedangkan Natsir adalah kelompok anak-anak dhuafa yang berpotensi turun ke jalanan. Total anak binaan Sekolah Cermat terhitung dari September 2017 April 2018 berjumlah 139 anak, 79 untuk Laskar Natsir dan 60 untuk Laskar Hamka.

Pada pertengahan tahun 2013 anak-anak dicitepus banyak yang mengharuskan dirinya turun ke jalan karena factor ekonomi orang tua mereka yang

berada dalam kondisi kekurangan. Anak-anak disana banyak yang putus sekolah karena lebih memilih mencari uang turun kejalan dan menghabiskan waktu mereka disana. Namun adapula yang semangat untuk bersekolahnya masih ada tetapi tetap tidak bias bersekolah karena harus mencari uang turun kejalan. Akhirnya pada tahun 2013, KAMMI Jawa Barat Membentuk sebuah lembaga social dengan nama rumah cermat dengan tujuan untuk mengurangi anak-anak yang putus sekolah dan turun kejalan yang khususnya berasal dari citepus.

Pada tahun berikutnya, rumah cermat mengganti namanya menjadi sekolah cermat dan telah berhasil mengurangi kurang lebih 15-20 anak untuk tidak turun kejalan lagi. Puncaknya pada tahun 2015, anak-anak yang dibina oleh sekolah cermat KAMMI Jawa Barat yang berasal dari Citepus sudah tidak turun lagi kejalan dan akhirnya sekolah cermat melanjutkan program pengasuhan yang berfokus pada, Advokasi Sekolah, Pelatihan skill berwirausaha dan berbagai pelatihan untuk orang tua. Beberapa program sekolah cermat sampai pada tahun 2017 bisa berjalan dengan cukup baik. Anak-anak binaan sekolah cermat 90% sudah kembali dapat bersekolah, anak-anak usia remaja sudah banyak yang bekerja danberwirausaha walaupun belum dalam jumlah yang cukup besar dikarenakan terkendala dalam pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkan diatas, bahwasanya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Sekolah Cermat KAMMI Jawa Barat dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Dikalangan Anak Jalanan” (Penelitian di Citepus Kelurahan Padjajaran Cicendo Kota Bandung)**

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah dapat di indentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya anak putus sekolah akibat masalah ekonomi dan disorganisasi keluarga
2. Anak-anak usia sekolah yang kembali bekerja di jalanan karna kebutuhan
3. Latar belakang anak jalanan yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sekitar
4. Kurangnya penanganan anak jalanan yang ada di Kota Bandung
5. Pelaksanaan penanganan yang lemah pada anak jalanan di Kota Bandung
6. Kota Bandung yang dianggap sebagai kota urban menjadikannya memikat jumlah anak jalanan dan juga semakin banyaknya rumah singgah yang ada.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas yaitu tentang pembinaan dan motivasi belajar pada anak jalanan khususnya di Sekolah Cermat, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan pola peningkatan motivasi belajar anak jalanan di Lembaga Sekolah Cermat?
2. Apa Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan motivasi belajar anak jalanan di Lembaga Sekolah Cermat?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Sekolah Cermat dalam peningkatan motivasi belajar anak jalanan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui proses dan pola peningkatan motivasi belajar anak jalanan di Lembaga Sekolah Cermat
2. Untuk Mengetahui Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan motivasi belajar anak jalanan di Lembaga Sekolah Cermat
3. Untuk Mengetahui Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Sekolah Cermat dalam peningkatan motivasi belajar anak jalanan

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta keilmuan sosiologi khususnya tentang pembinaan pendidikan pada anak jalanan, yang dimana pembinaan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anak jalanan dan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah untuk menambah khasanah intelektual di kalangan masyarakat akademis, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan teori.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Untuk memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan dan terus mengembangkan tiap program yang ada di Sekolah Cermat. Sebagai bahan

evaluasi untuk lebih memfokuskan pada pembinaan pendidikan yang merata bagi semua golongan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai pengetahuan serta memberikan informasi bahwa Sekolah Cermat memiliki kontribusi terhadap pembangunan kehidupan sosial pada masyarakat marjinal serta acuan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pendidikan anak jalanan.

c. Bagi calon peneliti

Untuk memperluas pengetahuan tentang pendidikan dan kehidupan sosial disekitar. Untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan wawasan yang luas tentang penelitian ini serta sebagai referensi dan pelengkap dari penelitian yang telah ada.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Suatu proses, mentransfer ilmu pengetahuan yang pada umumnya dilakukan melalui tiga cara yaitu, lisan, tulisan, dan perbuatan. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, bagaimanapun juga disitu ada pendidikan.

Pendidikan sudah kita terima sejak lahir. Pendidikan bisa bersifat formal ataupun informal. Informal maknanya pendidikan yang bisa kita dapatkan melalui lingkungan, pergaulan, dan keseharian di rumah. Sedangkan formal dalam artian

pendidikan yang diperoleh melalui jalur resmi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. (Nurhayati, 2010: 45). Anak jalanan merupakan anak yang berusia antara 7 hingga 18 tahun serta berstatus belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan yang menghabiskan waktu sepanjang hari di jalan maupun tempat umum. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti mengamen, membersihkan mobil, menyemir sepatu dan menjadi pedagang asongan (Soetji Andari, 2007: 8). Disebut sebagai anak termajinarkan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Anak yang rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang dan benar-benar dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan terjadi hal-hal yang mengancam jiwa mereka seperti pemerasan, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. (Bagong Suryanto, 2010: 186)

Menurut parson upaya perubahan sosial harus dimulai dengan studi struktur sosial terlebih dahulu. Struktur sosial didefinisikan sebagai suatu tatanan yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang tersusun secara vertical ataupun horizontal, atau dapat juga didefinisikan sebagaimana suatu yang diinginkan masyarakat terorganisasi dalam hubungan-hubungan yang dapat diprediksi melalui pola dan perilaku secara terus-menerus antara individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Parson melahirkan teori fungsional tentang perubahan, seperti para pendahulunya, parson menganalogikan perubahan yang terjadi dimasyarakat seperti halnya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Komponen utama dari pemikiran parson adalah adanya diferensiasi. Parson berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang

berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan pada makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat mengalami perubahan, pada umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa, parson termasuk golongan pemikir yang memandang optimis sebuah proses perubahan. (Doyle Paul. 1986: 103) Asumsi dasar dari teori fungsionalisme structural ialah bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar adanya kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sehingga, masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu system yang secara fungsional terintegrasi satu sama lain dalam keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan system sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Teori structural fungsional mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya suatu kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Teori struktur fungsional parson mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan yang terjadi dan kelangsungan system. Teori ini menganut paham positivism, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa spesialisasi harus diganti dengan pengujian pengalaman secara sistematis, sehingga dalam melakukan pengkajiannya harus emngikuti aturan ilmu pengetahuan. Fenomena tidak didekati secara kategoris, berdasarkan tujuan membangun ilmu dan bukan untuk tujuan praktis.

Pendekatan structural fungsional dapat dilakukan pengkajian dengan anggapan dasar bahwa masyarakat harus dilihat sebagai system dari bagian yang saling berhubungan, hubungan yang terjadi saling mempengaruhi dan terjadi timbal balik. Meskipun integritas sosial tidak dapat dicapai secara sempurna, secara fundamental system sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan yang bersifat dinamis. System sosial akan senantiasa berproses kearah integrase sekalipun terjadi ketergantungan. Perubahan dalam system sosial terjadi secara gradual (perlahan atau bertahap) melalui berbagai macam penyesuaian dan tidak secara revolusioner dengan cepat. Factor yang paling penting dan memiliki daya integrase suatu system sosial adalah consensus atau mufakat antara para anggota masyarakat dengan nilai-nilai kemasyarakatannya.

Dalam perspektif structural fungsional, perilaku yang melembaga sebagai system sosial berproses melalui strategi fungsional. Strategi analisis fungsional parson menegaskan bawa struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Apabila tindakan yang dimaksud menuju pelembagaan atau terlembagaka oleh berbagai persyaratan dalam suatu norma tindakan. Kehidupan masyarakat akan terus berlangsung jika persyaratan normative dari tindakan dengan orientasi motivasional dan orientasi nilainya secara pasti dipola secara structural.

Keberadaan anak jalanan dinegara berkembang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan. Fenomena ini kemudian terjadi karena keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Rendahnya pengetahuan menjadikan sifat atau

akhlak seseorang dalam bersikap dimasyarakat menjadi buruk. Baik buruknya karakter seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga namun juga oleh masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada disekitarnya.

Sekola Cermat dalam hal ini memiliki tanggung jawab terhadap kondisi pendidikan dan sosial masyarakat sekitar. Oleh karena itu sekolah cermat mempunyai peran penting dalam pembinaan anak-anak jalanan. Sekolah cermat menjadi salah satu fungsi fasilitator untuk anak-anak jalanan dan dhuafa mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu sekolah cermat juga memiliki pengaruh untuk membentuk karakter anak jalanan. Baik buruknya perilaku seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut bertutuh kata.

Dalam mengkaji tentang pembinaan yang dilakukan pendidikan pada anak jalanan, menggunakan teori yang populer dalam sosiologi yaitu teori structural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parson. Secara sederhana teori structural fungsional menjelaskan bagaimana setiap struktur dan system dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan jangka waktu yang lama.

Talcott Parson menyebutkan bahwa ada empat fungsi penting untuk system tindakan. Empat fungsi itu kemudian dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latency*). Skema AGIL berfungsi untuk menciptakan kondisi dalam struktur yang teratur (Ambo Upe. 2010: 118)

Adaptation (Penyesuaian) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana system yang ada dalam lembaga pendidikan diharapkan bias menyesuaikan dengan

kebutuhan yang ada di masyarakat. Lebih dari itu lembaga pendidikan diharapkan bias meminimalisis rendahnya pendidikan di Indinesua

Goal Attainment (Pencapaian tujuan) adalah konsep yang membicarakan tujuan. Pembinaan yang dilaksanakan di Sekolah Cermat sendri harus mampu mencapai visi dan misi yang dijalankan dan diterapkan dalam masyarakat. Bukan hanya itu, sekolah cermat harus mendefinisikan tujuan utamanya.

Integration (Integrasi atau Penyatuan) sebuah konsep yang berupaya menyatukan berbagai macam komponen yang ada dalam suatu system. System integrase juga mengelola antara hubungan dengan penyesuaian.

Latency (Pemeliharaan) adalah usaha yang dilakukan untuk melengkapi, memelihara serta memperbaiki motivasi pola kultural. Pembinaan yang dilakukan di Sekolah Cermat harus mampu untuk menjalankan konsep pemeliharaan agar tetap terjaga dan terpelihara keberlangsungannya. (Ambo Upe. 2010: 118)

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

